

**TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER DAN PASIEN  
DALAM PELAKSANAAN OPERASI BEDAH CAESAR  
(Studi di RSUD dr. Soedono kota Madiun)**



**Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum**

**Oleh :**

**ENGGAR KARTIKA**

**C100150222**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DAN PASIEN DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR  
STUDI RSUD dr. SOEDONO MADIUN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ENGGAR KARTIKA**

**C100150222**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**(Nuswardhani, S.H., S.U)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DAN PASIEN DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR**

**OLEH**

**ENGGAR KARTIKA**

**C100150222**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 8 Juli 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Dr.Nuswardhani, S.H., S.U** (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr.Rizka, S.Ag., M.H** (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Kuswardhani , S.H., M.Hum** (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji)

**Dekan,**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum**

**NIK. 537 / NIDN.0727085803**

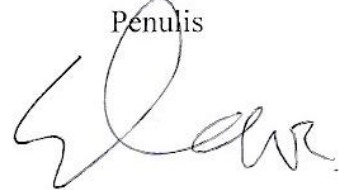
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 02 Juli 2019

Penulis



**ENGGAR KARTIKA**  
**C100150222**

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DAN PASIEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR**

### **Abstrak**

Didalam ilmu kedokteran suatu proses persalinan dapat dilakukan secara normal serta bedah caesar. Dalam melakukan suatu proses persalinan khususnya persalinan operasi bedah caesar tentunya terdapat hubungan antara pihak dokter dan pasien. Dokter harus berusaha semaksimal mungkin agar tindakan yang dilakukan dalam operasi caesar itu berhasil, sedangkan pasien harus mentaati semua perintah dokter yang ada hubungannya dengan operasi caesar tersebut, sehingga operasi caesar dapat berhasil dengan baik pula. Hubungan antara dokter dengan pasien tersebut terjadi karena adanya suatu perjanjian diantara keduanya untuk melahirkan suatu kesepakatan seperti yang tercantum dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata untuk melakukan tindakan operasi bedah caesar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian antara dokter dan pasien dalam operasi bedah caesar, hak dan kewajiban masing masing pihak dalam perjanjian operasi bedah caesar dan tanggungjawab hukum para pihak jika terjadi kesalahan dalam perjanjian operasi bedah caesar. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum adalah menggunakan pendekatan normativ yang meneliti tentang asas hukum, kaidah kaidah hukum peraturan hukum dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar. Penelitian ini bersifat deskriptif yang sifatnya memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang Tanggung jawab hukum dokter dan pasien dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam proses serta pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar harus memenuhi peraturan yang mengaturnya, syarat syarat administrasi, syarat hukum, informed councent dan syarat kesehatan. Kemudian kesepakatan terjadi dengan ditandatanganinya surat persetujuan yang telah disediakan oleh pihak RSUD dr. Soedono Madiun. Sehingga dengan adanya kesepakatan dari pihak dokter dan pasien maka tindakan operasi bedah caesar dapat dilakukan. Dan dengan adanya kesepakatan menimbulkan hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi dokter dan pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono. Hak pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono merupakan kewajiban dokter bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun begitu pula sebaliknya hak dokter merupakan kewajiban pasien. Apabila terdapat kesalahan dari salah satu pihak dalam perjanjian operasi bedah caesar, maka ia harus dapat bertanggungjawab atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum apabila tidak terdapat itikad baik dalam melakukan perjanjian operasi bedah caesar.

**Kata Kunci:** operasi bedah caesar, perjanjian antara dokter dan pasien, tanggung jawab hukum

### **Abstract**

In medical science a labor process could be done normally or cesarean section. In carrying out a labor, especially cesarean section surgery, of course there is a relationship between the doctor and the patient. The doctor must make every effort so that the action taken in the cesarean section were successful, while the patient

must obey all doctor's order related to the cesarean section, so that that cesarean section could work well. The relation between the doctor and the patient occurred because of agreement between the two to produce a concurrence as stated in article 1320 paragraph 1 of KUHPerdata to carry out cesarean section. The purpose of this study was to investigate the process of implementation of the agreement between doctor and patient in a cesarean section, the right and obligation of each party in a cesarean section, and the legal responsibility of the parties if there was an error in a cesarean section. Approach method used based on legal research was a normative approach that examined the principles of legal law and legal regulation in the implementation of cesarean surgery. The research was descriptive which provides a systematic and comprehensive description of the legal responsibility of doctors and patient in the implementation of cesarean section. The result of the research states that in the process and implementation of the agreement cesarean surgery must meet the regulation that governs it, the terms of administrative requirements, legal requirements, informed consent and health requirements. Then an agreement occurred with the signing of the approval letter that had been provided by RSUD dr. Soedono Madiun. So that with the agreement of the doctors and patient the cesarean section could be performed. And the existence of an agreement gave rise to legal relations and gave rise to the rights and obligations of doctor and patients cesarean section in RSUD dr. Soedono Madiun. The right of a cesarean patient in RSUD dr. Soedono Madiun is the obligation of a cesarean surgeon in RSUD dr. Soedono Madiun and vice versa, the right of the doctor is the responsibility of the patient. If there was an error from one of the parties in the cesarean section, then they must be able to be responsible on the basis of default and unlawful conduct if there is no good faith in conducting a cesarean section surgery agreement.

**Keyword:** cesarean section surgery, agreement between doctor and patient, legal responsibility

## 1. PENDAHULUAN

Didalam ilmu kedokteran suatu proses persalinan dapat dilakukan secara normal serta bedah caesar. Pengertian persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Sedangkan pengertian bedah caesar adalah suatu cara melahirkan janin dengan cara membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina atau sectio caesarea adalah suatu histerotomia untuk melahirkan janin dari dalam rahim (Mochtam, 1998). Perjanjian antara dokter dan pasien bedah caesar merupakan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan operasi bedah caesar tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, sering kali terdapat kendala atau permasalahan yang timbul dalam praktik kedokteran. Seperti antara lain tidak pahamnya pasien atas penjelasan dari dokter, masalah ikut campurnya pihak ketiga atau keluarga dalam hal pemberian persetujuan, dan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan operasi bedah caesar atau tindakan medik yang dilakukan kepada pasien menimbulkan kerugian bagi pasien. Sebagai contoh kasus seorang ibu yang kemudian terjadi komplikasi setelah dilakukannya operasi karena ada alat medik yang masih tertinggal diperut ibu yang kemudian menjadikan infeksi. Sehingga dalam hal ini dokter harus benar benar berusaha semaksimal mungkin dalam menangani pasien sesuai dengan ilmu kedokteran yang dimiliki agar kemudian operasi dapat berjalan dan berhasil yaitu dengan lahirnya janin dengan kondisi sehat begitupula dengan ibu.

Kemudian mengenai informasi dokter untuk pasien sebelum dilaksanakan operasi bedah caesar sudah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik No HK 00.04.7.3.3725 melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 tentang *informed consent*, bahwa dokter yang ingin melakukan operasi lebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang dilakukan apa manfaatnya, apa risikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan. Keterangan tersebut harus diberikan secara jelas, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien, sesuai dengan tingkat pendidikan dan intelektualnya. *Informed Consent* menjadi salah satu dasar pertimbangan dokter dalam mengambil tindakan medik untuk menyelamatkan nyawa seseorang termasuk dalam melakukan tindakan operasi bedah caesar.

Informasi mengenai tindakan yang dilakukan, manfaat dan risikonya menjadi hak pasien karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Aktivitas seseorang dapat dilakukan dan berlangsung dengan baik jika kondisi seseorang tersebut sehat. Pembangunan juga dapat berlangsung dengan baik jika masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

Dokter saat menangani pasien di rumah sakit tidak bertindak atas nama pribadi melainkan bertindak atas nama rumah sakit. Dalam hal ini dokter melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menjalankan tugas yang dibebankan rumah sakit kepadanya. Hubungan yang terbentuk antara dokter dan rumah sakit dalam hal ini adalah dokter bekerja sebagai karyawan dari rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan dokter tersebut.

Apabila kemudian pasien merasa dirugikan dengan adanya tindakan medik yang dilakukan kepadanya yang kemudian menyebabkan kerugian baginya maka dalam hal ini pasien dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini karena pasien adalah orang awam yang tidak tahu menahu tentang pembuktian maka dokterlah yang harus membuktikan bahwa apa tindakan medik yang dilakukan kepada pasien sudah sesuai dengan standart profesi medik.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis menuliskan rumusan masalah dapat dirumuskan yaitu: 1) Bagaimana proses perjanjian antara dokter dan pasien dalam melakukan operasi bedah caesar, 2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian operasi bedah Caesar 3) Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak jika ia melakukan kesalahan dalam persalinan operasi bedah caesar tersebut, yang didasarkan atas wanprestasi dari dokter dan pasien.

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui rumusan masalah yang sudah dirumuskan yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian antara dokter dan pasien dalam melakukan operasi bedah caesar. 2) Untuk mengetahui bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari adanya suatu perjanjian operasi bedah Caesar. 3) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum para pihak jika ia melakukan kesalahan dalam persalinan operasi bedah caesar yang didasarkan atas wanprestasi dari dokter dan pasien. Adapun manfaat bagi penelitian berupa: 1) Manfaat Bagi Penulis untuk memberikan dan menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum kesehatan, yang berfokus kepada ilmu hukum perjanjian khususnya yang berkenaan dengan adanya perjanjian operasi bedah Caesar antara dokter dengan pasien 2) Manfaat Bagi Masyarakat dari hasil



penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang perjanjian operasi bedah caesar dan masyarakat menjadi jauh lebih mengerti tentang perjanjian operasi bedah Caesar 3) Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan sebagai bahan literature dan serta menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengetahuan untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan perjanjian operasi bedah Caesar di RSUD dr. Soedono Madiun.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yaitu normative. Dalam hal ini penulis meneliti asas hukum, kaedah kaedah atau peraturan hukum dalam pelaksanaan operasi bedah caesar sehingga dalam pelaksanaan operasi bedah Caesar di RSUD dr. Soedono Madiun mempunyai legalitas atau hukum sehingga dapat dilindungi oleh hukum.

Jenis penelitian ini bersifat diskriptif dengan yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang Tanggung jawab hukum dokter dan pasien dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah Caesar di RSUD dr. Soedono Madiun.

Jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh dari a) Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mencari sumber data sekunder untuk mendapatkan bahan yaitu Bahan Hukum Primer adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Bahan hukum sekunder dokumen pendukung terkait, serta hasil penelitian hukum tanggungjawab hukum dokter dan pasien dalam perjanjian operasi bedah caesar b) Penelitian lapangan penelitian terhadap perjanjian operasi bedah caesar di RSUD dr. Soedono Madiun.

Metode Pengumpulan Data meliputi: Studi Kepustakaan, penelitian lapangan (wawancara), kemudian Metode analisis data penelitian menggunakan metode diskriptif kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Dokter dan Pasien Bedah Caesar Di RSUD dr. Soedono Madiun.**

Sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian bedah caesar antara dokter dan pasiendokter dan pasien terlebih dahulu harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi dan syarat hukum dan syarat kesehatan yang telah ditentukan oleh RSUD dr. Soedono Madiun yaitu syarat administrasi : Identitas lengkap pasien, bahwa pasien sudah menerima informasi dari dokter mengenai seluk beluk operasi bedah Caesar, Harus adanya persetujuan dari pihak pasien yang bersifat sukarela tanpa adanya paksaan, Kemudian pasien atau yang mewakilinya mendatangi akta formulir yang telah disediakan oleh pihak Rumah Sakit dr. Soedono madiun sebagai kesepakatan dilaksanakannya operasi bedah caesar serta bukti bahwa sudah terjadi *informed councend*.

Kemudian persyaratan hukum yang harus dipenuhi dan dijadikan pedoman perjanjian operasi bedah caesar yaitu pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2) Kecakapan hukum 3) Suatu hal tertentu 4) suatu sebab yang halal.

Kemudian informed councend yaitu sebelum pasien melakukan operasi bedah caesar maka dokter harus memberikan informasi tentang tindakan operasi bedah caesar beserta kelebihan atau keuntungan dan kerugian yang diderita pasien dengan informasi tersebut pasien dapat mengikuti atau tidak mengikuti operasi bedah caesar sesuai yang diinformasikan dokter.

Selanjutnya syarat kesehatan yang harus dipenuhi oleh pasien yaitu pasien harus mengikuti beberapa tes dan pemeriksaan sebelum dilaksanakannya operasi bedah caesar yaitu: 1) pemeriksaan darah routine yaitu apakah pasien memiliki riwayat *hipertensi* atau darah tinggi, apabila pasien menderita hipertensi maka harus dilakukan penormalan terhadap pasien terlebih dahulu sampai tekanan darah normal 2) Pemeriksaan gula darah pasien. 3) pemeriksaan rontgen 4)pemeriksaan EKG/ rekam jantung untuk mengetahui detak jantung pasien, kondisi jantung pasien 5) pemeriksaan laboratorium yang meliputi fungsi hati dimana pasien harus menjalani proses pemeriksaan apakah pasien mengidap virus hati atau hepatitis atau tidak,

apabila pasien positif mengidap hepatitis maka tim dokter harus mengadakan APD, *safety* dokter dan perawat harus terjaga dengan baik. 6) Pemeriksaan urine pasien. 7) Setelah seluruh proses pemeriksaan dilakukan serta sudah mendapat persetujuan dari pihak pasien dan keluarga maka sebagai tindak lanjut pra operasi bedah caesar apabila perlu pasien diminta untuk puasa.

Hal ini dimuat didalam rekam medis pasien yang didalamnya memuat segala informasi terkait kesehatan dari pasien. Rekam medis pasien tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan jika ada tuntutan pasien ke Pengadilan Negeri.

Dengan terpenuhinya syarat administrasi, syarat hukum, informed consent dan syarat kesehatan dan para pihak sudah menyetujui akan diadakannya operasi bedah caesar maka pasien melakukan pengisian surat formulir, kemudian dokter dan pasien melakukan penandatanganan terhadap perjanjian operasi bedah caesar yang dibuat rangkap 2 (dua) yang sudah dibuat oleh pihak RSUD dr. Soedono Madiun.

Terjadinya kesepakatan para pihak yaitu dokter dan pasien di dalam perjanjian operasi bedah caesar menimbulkan pengaruh untuk dilaksanakan perjanjian operasi bedah caesar yang para pihak terikat didalamnya sehingga timbul hubungan hukum antara pihak dokter dan pasien RSUD dr. Soedono Madiun dengan adanya kewajiban dan hak para pihak yang harus dipenuhi.

### **3.2 Hak dan kewajiban serta peraturan yang diatur dalam perjanjian operasi bedah caesar antara dokter dan pasien RSUD dr. Soedono Madiun**

Perjanjian operasi bedah caesar adalah dimana pihak dokter mengikatkan diri untuk melakukan tindakan medik pembedahan caesar untuk membantu ibu melahirkan janin karena tidak dimungkinkan dilakukan persalinan normal.

Terjadinya perjanjian operasi bedah caesar harus memuat syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2) Kecakapan hukum 3) Suatu hal tertentu 4) suatu sebab yang halal.

Dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar harus terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien. Dengan adanya kesepakatan maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing masing pihak yaitu dokter dan pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun.

Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban dokter dan pasien bedah caesar diatur didalam Berdasarkan UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 50 dan 51 hak dan kewajiban dokter. Hak dokter yaitu: 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.2)Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasinal prosedur 3)Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarganya.4)Menerima imbalan jasa. Kewajiban dokter yaitu: 1) Memberikan pelayanan medis sesuai standar provesi dan standar operasional serta kebutuhan medis.2)Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melaksanakan suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa merujuk pasien kedokter/ sarana kesehatan lain yang mempunyai kemampuan yang lebih baik.3)Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.4)Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya.5)Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Adapun hak dan kewajiban pasien hal ini dijelaskan dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 dan 53. Adapun Hak pasien yaitu:1) Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter.2)Bisa meminta pendapat dokter lain(*second opinion*). 3) Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan.4)Bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila terdapat kerugian.5)Bisa mendapat informasi rekam medis. Sedangkan kewajiban pasien:1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur dan dipahami tentang masalah kesehatannya.2)Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter.3)Mematuhi ketentuan yang berlaku disrana pelayanan kesehatan.4.Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

### **3.3 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan Atas Perbuatan Melawan Hukum**

Pada dasarnya permasalahan dalam perjanjian operasi bedah caesar muncul apabila terdapat kelalaian salah satu pihak dalam praktiknya kelalaian dokter didalam memberikan tindakan medik.Tanggung jawab hukum tersebut terjadi apabila dokter yng melakukan tindakan bedah caesar melakukan kesalahan (mal practice) yang

mengakibatkan kerugian pada pihak pasien bedah caesar sehingga pasien meninggal dunia. Yang di dasarkan pada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Wanprestasi dapat berupa cidera janji yang berarti ketidaktepatan yang telah diperjanjikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan suatu kerugian terhadap salah satu pihak dalam perjanjian. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Mengenai tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, maka diantara pihak dokter dan pihak pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun akan menyelesaikannya dengan cara damai atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai, maka pihak yang dirugikan dalam hal ini pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun dapat mengajukan tuntutan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri.

Contoh tuntutan pasien yaitu apabila setelah selesai dilakukannya operasi kemudian terjadi komplikasi seperti pasien mengalami pembengkakan dalam perut yang disebabkan karena adanya infeksi yang menyebabkan pasien meninggal dunia maka pasien dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri.

Kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya melakukan tindakan medik bedah caesar yang disebabkan wanprestasi berkaitan dengan adanya kontrak terapeutik yang pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban yang timbul dari adanya kontrak terapeutik tersebut menurut sifat kontrak yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang undang. Dengan demikian pasien harus dapat membuktikan bahwa akibat kerugian terjadi karena tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku dalam kontrak terapeutik. Dalam hal ini pembuktian harus dilakukan oleh dokter karena pasien adalah orang awam yang tidak tahu menahu tentang pembuktian.

Tanggungjawab dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum merupakan kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya atau kesalahan profesional yang pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban profesinya.

Perbuatan hukum disini berarti perbuatan yang melanggar hal baik dalam hukum untuk yang sedang berlaku maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma norma kepatutan, ketelitian, dan sifat kehati hatian dalam melakukan operasi bedah caesar'. Dalam hal ini juga dokter yang harus melakukan pembuktian karena pasien tidak memiliki kompeten untuk melakukan pembuktian.

Dengan demikian jika memang terbukti bersalah (melakukan malpractice) dalam melakukan operasi bedah maka dokter harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian menurut hokum. Dalam hal ini karena pelaksanaan operasi bedah caesar dilakukan di RSUD dr. Soedono dan merupakan rumah sakit pemerintah maka Rumah sakit bertanggungjawab atas hal tersebut.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

###### **4.1.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Caesar antara dokter dan pasien di RSUD dr. Soedono Madiun**

Bahwa proses pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar antara dokter dan pasien RSUD dr. Soedono Madiun sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, baik tentang syarat syarat hukum, syarat administrasi, informed counsents, dan syarat kesehatan. Serta tindakan tindakan yang diberikan oleh dokter bedah RSUD dr. Soedono Madiun sudah sesuai dengan standard profesi dan standard ilmu kedokteran yang benar.

###### **4.1.2 Peraturan serta hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian operasi bedah caesar**

Peraturan yang mengatur tentang perjanjian operasi bedah caesar antara dokter dan pasien RSUD dr. Soedono Madiun sudah mengacu pada aturan yang seharusnya digunakan yaitu Undang Undang Kesehatan, Peraturan Menteri kesehatan sehingga ada kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar di RSUD dr. Soedono Madiun. Kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban masing masing pihak dalam hal ini dokter bedah dan pasien bedah RSUD dr. Soedono Madiun sudah diatur dengan jelas didalam surat kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh pihak

dokter dan pasien sehingga jelas apasaja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh dokter dan pasien.

- 4.1.3 Tanggung jawab hukum para pihak jika ia melakukan kesalahan dalam persalinan operasi bedah caesar yang didasarkan atas wanprestasi dari dokter dan pasien

Tanggungjawab hukum para pihak dalam perjanjian operasi bedah caesar di RSUD dr. Soedono Madiun muncul apabila terdapat kesalahan dari salah satu pihak yaitu dokter ataupun pasien. Dengan adanya kesalahan dari salah satu pihak dan sudah terbukti bahwa benar telah melakukan suatu kesalahan maka pihak yang dianggap telah melakukan kesalahan harus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## **4.2 Saran**

- 4.2.1 Bagi pihak dokter bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun

Dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun, hendaklah pihak dokter dalam hal ini dibawah naungan RSUD dr. Soedono Madiun memberikan ketentuan ketentuan atau peraturan peraturan yang jelas dan tegasmengenai operasi bedah caesar yang harus dicantumkan dalam akta perjanjian. Sehingga dapat diketahui dengan seksama karena apabila tidak ditulis dengan jelas dan hanya diselesaikan dengan musyawarah seringkali membuat pasien tidak paham dan memungkinkan untuk terjadi kesalahan.

- 4.2.2 Bagi pihak pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun

Dalam pelaksanaan operasi bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun ini, hendaklah pihak pasien berhati hati dan benar benar mengerti dengan apa yang telah dijelaskan dokter terkait penanganan yang akan dilakukan kepadanya serta mendengarkan dan mematuhi semua perintah dokter setelah dilaksanakan operasi bedah caesar supaya segera lekas sembuh.

- 4.2.3 Bagi Masyarakat

Dalam melakukan perjanjian operasi bedah cesar RSUD dr. Soedono Madiun masyarakat bisa lebih berhati hati dan teliti. Masyarakat juga harus paham mengenai syarat dan ketentuan untuk dapat melaksanakan operasi bedah

caesar. Dan apabila isi penjelasan yang diberikan oleh dokter tidak dimengerti sebaiknya bertanya atau mencari tahu terlebih dahulu bagaimana proses perjanjian operasi bedah caesar yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena tidak semua orang paham mengenai hukum dan menghindari dari hal buruk yang mungkin terjadi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Elvandari, Siska. (2015). *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Thafa Media

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Mochtam, Rustam. (1998). *Sinopsis Obstetri Edisi .2*. Jakarta: EGC.

UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 50,51,53,54 Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien.